

ABSTRAK

Demi terlaksananya pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dapat diwujudkan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, Pemerintah melakukan pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar. Dalam pemungutan pajak tersebut, seringkali dijumpai Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan dari sektor pajak tidak mencapai hasil yang signifikan. Oleh karenanya, belakangan ini Pemerintah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Adanya kejujuran Wajib Pajak dalam mengungkapkan hartanya sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak, karena apabila suatu hari ditemukan data/informasi yang tidak atau kurang diungkap oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat dikenai sanksi sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak. Selain itu, pengampunan pajak ini dapat memperluas basis data perpajakan yang lebih valid.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Ketidakejujuran Wajib Pajak, Pengampunan Pajak.

ABSTRACT

*Government tax purposes in national development to improve people's welfare by use national source of fund specifically taxes. Tax is a large revenue for a country. In tax collection, often found taxpayers who do not do their taxation liabilities affecting country revenue could not achieve significant target. Recently, the government implement a tax amnesty policy to enhance people participation. The honesty of taxpayers indispensable for tax amnesty policy implementation since one day in case any information or data are not/less revealed by taxpayers they will sanctioned as regulated by tax amnesty rule. Furthermore, tax amnesty also increase validity taxation data base.*

*Keywords : Juristical Consequence, Dishonesty Taxpayer, Tax Amnesty.*